



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

EVALUASI PENYESUAIAN TARIF BEBERAPA RUAS TOL DI INDONESIA

Mandala Harefa
Analisis Legislatif Ahli Utama
mandhar@dpr.go.id

Ulayya Sarfina
Analisis Legislatif Ahli Pertama
ulayya.sarfina@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada September 2024, beberapa ruas tol di Indonesia mengalami penyesuaian tarif. Dasar hukum penyesuaian tarif mengacu pada Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Evaluasi dan penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun, mempertimbangkan inflasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Tujuan penyesuaian ini adalah untuk menjaga kualitas layanan, menyesuaikan dengan inflasi, serta memastikan biaya operasional dapat terpenuhi.

Ruas tol yang mengalami penyesuaian tarif meliputi Tol Dalam Kota Jakarta, Tol Cibitung – Cilincing Seksi 1, dan Tol Bintaro Serpong Damai (BSD). Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KepmenPUPR) Nomor 2130/KPTS/M/2024, tarif Tol Dalam Kota Jakarta disesuaikan mulai 22 September 2024. Penyesuaian ini berlaku pada ruas Cawang – Tomang – Pluit dan ruas Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit. Selain itu, Tol Cibitung – Telaga Asih (Cibitung – Cilincing Seksi I) juga mengalami penyesuaian tarif pada 22 September 2024, sesuai KepmenPUPR Nomor 2112/KPTS/M/2024. Ruas Tol Pondok Aren – Serpong, bagian dari Tol BSD, telah mengalami penyesuaian tarif sejak 15 September 2024, berdasarkan KepmenPUPR Nomor 2149/KPTS/M/2024. Selain ketiga ruas tol ini, beberapa tol lainnya di Jawa dan Sumatera juga akan mengalami penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif mencakup berbagai kategori kendaraan dengan kenaikan antara Rp500 hingga Rp2.500. Di Tol Dalam Kota Jakarta, tarif Golongan I naik dari Rp10.500 menjadi Rp11.000, Golongan II dan III naik dari Rp15.500 menjadi Rp16.500, serta Golongan IV dan V naik dari Rp17.500 menjadi Rp19.000. Di Tol Cibitung-Cilincing, tarif Golongan I naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.500, Golongan II dan III dari Rp8.000 menjadi Rp9.500, dan Golongan IV serta V dari Rp10.500 menjadi Rp13.000. Sementara itu, di Tol BSD, tarif Golongan I naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500, Golongan II dan III dari Rp13.500 menjadi Rp14.000, dan Golongan IV serta V dari Rp16.000 menjadi Rp18.500.

Kenaikan tarif tol ini memicu keluhan dari masyarakat, terutama yang menggunakan tol untuk transportasi harian dan logistik, akibat beban transportasi yang semakin besar. Beberapa masyarakat mulai mempertimbangkan beralih ke transportasi umum yang dinilai lebih murah dan efisien. Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota (FAKTA Indonesia), Tubagus Haryo Karbyanto, menilai kenaikan tarif tol menambah beban masyarakat dalam menghadapi peningkatan biaya hidup. Ali Tranghanda, pengamat properti dari Indonesia Property Watch, juga berpendapat bahwa kenaikan ini berdampak pada masyarakat, terutama kelas menengah. Diperkirakan bahwa beban tambahan ini menurunkan daya beli dan minat masyarakat terhadap properti dan barang lainnya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, masyarakat berharap kenaikan tarif diimbangi dengan peningkatan nyata dalam kualitas layanan. Pengamat transportasi dari Majelis Profesi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muslich Zainal Asikin, menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung di tol, seperti kondisi jalan, manajemen lalu lintas yang lebih baik, serta layanan

yang lebih cepat dan aman. Menurutnya, sosialisasi mengenai alasan kenaikan tarif harus lebih intensif agar masyarakat dapat memahami tujuan penyesuaian ini. Menjawab keluhan tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan bahwa kenaikan tarif tol bertujuan mendukung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam memperbaiki infrastruktur. Namun, BUJT perlu memperbaiki kualitas jalan tol terlebih dahulu melalui perawatan rutin dan optimalisasi sistem manajemen lalu lintas dalam meminimalisasi kemacetan. Begitu pula dengan implementasi teknologi baru seperti kamera pengawas dan sistem pembayaran elektronik berbasis *Single Lane Free Flow* (SLFF) serta *Multi Lane Free Flow* (MLFF) untuk mempercepat transaksi di gerbang tol. Selain itu, fasilitas pendukung seperti *rest area* akan diperbaiki untuk kenyamanan pengguna jalan tol. Semua program tersebut dilakukan untuk memenuhi SPM yang meliputi aspek kualitas jalan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengguna tol. Oleh sebab itu, evaluasi kebijakan penyesuaian tarif tol ini menjadi penting agar kenaikan tarif sebanding dengan peningkatan layanan yang diterima oleh masyarakat.

Atensi DPR

Isu terkait kebijakan penyesuaian tarif tol harus menjadi perhatian Komisi V DPR RI karena berpotensi memengaruhi biaya logistik dan transportasi, terutama bagi pengguna harian yang bergantung pada jalan tol. Masyarakat berharap peningkatan kualitas layanan tol dilakukan terlebih dahulu seiring dengan penyesuaian tarif. Oleh karena itu, melalui fungsi pengawasannya, Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa upaya perbaikan infrastruktur jalan, optimalisasi manajemen lalu lintas, serta peningkatan fasilitas pendukung, seperti *rest area* dan sistem pembayaran elektronik terlaksana dengan baik. Komisi V DPR RI juga diharapkan mampu mendorong evaluasi kebijakan dalam penyesuaian tarif tol, guna mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan memastikan transparansi informasi agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sumber

cncindonesia.com, 15 dan 20 September 2024;
cnnindonesia.com, 19 September 2024;
detikoto.com, 19 September 2024;
kompas.com, 20 September 2024;
lampung.viva.co.id, 20 September 2024;
narasi.tv, 20 September 2024;
rri.co.id, 19 dan 20 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.